

Audit Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dengan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Kantor Daerah Kab. Kolaka)

Andi Nurhasanah¹, Sri Rahayu Indah Azhari², Ari Sarwo Indah Safitri³

Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah, Mamuju

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penetapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan kantor daerah kabupaten kolaka. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Simgarimbun, 2009). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri, atau perspektif lain (Erlina, 2008). populasi dalam penelitian ini adalah sekretariat dan SKPD. Hasil olah data dilakukan dengan menggunakan rumus champion (1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dengan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai dan diterapkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: *Audit, Pelaporan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan*

Abstract

This research aims to determine the suitability of setting government accounting standards in the financial reports of the Kolaka district regional office. The type of research carried out is survey research, namely research carried out by taking samples from a population and using a questionnaire as the main data collection tool (Simgarimbun, 2009). The analytical method used in this research is the descriptive analysis method, namely research on certain phenomena or populations obtained by researchers from subjects in the form of individuals, organizations, industries, or perspectives. others (Erlina, 2008). The population in this study was the secretariat and SKPD. The results of data processing were carried out using the champion formula (1990). The research results show that the Audit for Conformity of Implementing Government Accounting Standards (SAP) with the Completion of Kolaka Regency Regional Financial Reports is appropriate and implemented based on Government Accounting Standards.

Keywords: *Audit, Regional Financial Reporting, Government Accounting Standards*

Copyright (c) 2026 **Andi Nurhasanah¹**

✉ Corresponding author :

Email Address : Andi Nurhasanah29@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota tersebut, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang kompherensif. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangannya mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dilakukan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual, sampai basis akrual.

Akuntansi keuangan daerah menurut Halim. (2004.34) adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi(keuangan) dari identitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal identitas pemerintah daerah yang memerlukan. Karena akuntansi pemerintah/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Secara khusus laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dengan menyediakan informasi mengenai Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya, serta Ketaatan relavansi terhadap anggaran.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun pada faktanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat buruk. Bahkan, masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh *opini disclaimer* (tidak memberikan pendapat). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara komprehensif kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penyelesaian laporan keuangan pada Kantor Daerah Kabupaten Kolaka.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Daerah Kabupaten Kolaka dengan menggunakan Metode Penelitian Campuran (*Mixed Methods Research*) kualitatif dan kuantitatif yang menggabungkan metode pengumpulan data melalui proses interview, observasi, dokumentasi dan kuisisioner. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Daerah Kabupaten Kolaka.

Pengertian sampel menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari jumlah populasi yang ada, yang dijadikan sampel adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta yang terlibat di dalamnya, baik kepala bagian maupun staff kepegawaian.

Dalam penelitian ini pengolahan dilakukan dengan menggunakan perhitungan atas kuesioner dengan menggunakan rumus Champion (1990), yaitu dengan menjumlahkan jawaban "YA" kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$persentase = \frac{\Sigma \text{jawaban YA}}{\Sigma \text{Jawaban responden}} \times 100\%$$

Penelitian dilakukan dengan menyediakan jawaban secara "close ended quisionare" atau kuesioner secara tertutup yaitu pesponden hanya memberi dua alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, yaitu "YA" dan "TIDAK". Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan berupa angka skor berguna untuk pengambilan keputusan, (champion : 1990) yaitu:

- | | |
|--------------|---|
| 1. 0,00-0,25 | No association or low association (weak association) Tidak ada hubungan atau asosiasi rendah (hubungan yang lemah). |
| 2. 0,25-0,50 | Moderately low association (moderation association) Cukup rendah (asosiasi mederasi) |

3. 0,51-0,75 Moderalety high assiciation (moderation strong association) Asosiasi cukup tinggi (moderasi hubungan yang kuat)
4. 0,76-1,00 High association up to perfect association. Asosiasi tinggi hingga asosiasi sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Audit Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Penyelesaian Laporan Keuangan

Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Total
B.1.a)	16 (100%)	0	16
B.1.b)	14 (87,50%)	2 (12,50%)	16
B.1.c)	16 (100%)	0	16
B.1.d)	15 (93,75%)	1 (6,25%)	16
B.1.e)	16 (100%)	0	16
B.1.f)	16 (100%)	0	16
B.1.g)	16 (100%)	0	16

Tabel 1. Perhitungan Skor Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

$$\text{Persentase komponen laporan keuangan: } \frac{681,25\%}{7} \times 100 \equiv 97,32\%$$

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa indikator pertanyaan B.1.a) mengenai apakah komponen laporan keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari laporan realisasi anggaran, 100% responden menjawab "YA" dan 0% responden menjawab "TIDAK". Indikator pertanyaan B.1.b) mengenai apakah komponen laporan keuangan pada Kantor Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari laporan perubahan saldo anggaran lebih, 87.50% responden menjawab "YA" dan 12.50% responden menjawab "TIDAK". Indikator pertanyaan B.1.c) mengenai apakah komponen laporan keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari neraca, 100% responden menjawab "YA" dan 0% responden menjawab "TIDAK".

Indikator pertanyaan B.1.e) mengenai apakah komponen laporan keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari laporan arus kas, 100% responden menjawab "YA" dan 0 % responden menjawab "TIDAK". Indikator pertanyaan B.1.f) mengenai apakah komponen laporan keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari laporan perubahan ekuitas, 100% responden menjawab "YA" dan 0% responden menjawab "TIDAK". Indikator pertanyaan B.1.g) mengenai apakah komponen laporan keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari catatan atas laporan keuangan, 100% responden menjawab "YA" dan 0.% responden menjawab "TIDAK" sehingga memperoleh bobot skor sebesar 97.32%. maka dapat disimpulkan bahwa komponen laporan keuangan pada Kantor Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Total
I.1	16 (100%)	0	16
I.2	11 (68,75%)	5 (31,25%)	16
I.3	11 (68,75%)	5 (31,25)	16

Tabel 2 :Perhitungan Skor Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

Berdasarkan tabel 2. di atas diketahui bahwa pada indikator pertanyaan I.1 Mengenai apakah pengakuan unsur laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kolaka terdiri dari kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi, keandalan pengukuran, pengakuan asset, pengakuan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengakuan beban dan belanja, 100% responden menjawab YA dan 0%

$$\text{Persentase pengakuan unsur laporan keuangan} = \frac{237,5}{3} \times 100 = 79,16\%$$

responden menjawab TIDAK. Pada indikator pertanyaan I.2 mengenai apakah beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 68,75% responden menjawab YA dan 31,25% responden menjawab TIDAK. Pada indikator pertanyaan I.3 mengenai apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan 68,75% responden menjawab YA dan 31,25% responden menjawab TIDAK. Dengan demikian diperoleh bobot skor sebesar 79,16%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan pada laporan Keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

$$\text{Persentase pengakuan unsur laporan keuangan} = \frac{250}{4} \times 100 = 62,50\%$$

Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Total
J.1	12 (75,00%)	4 (25,00%)	16
J.2	12 (75,00%)	4 (25,00%)	16
J.3	4 (25,00%)	12 (75,00%)	16
J.4	12 (75,00%)	4 (25,00%)	16

Tabel 3: Perhitungan Skor Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pada indikator pertanyaan J.1 mengenai apakah pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kolaka menggunakan mata uang rupiah, 75% responden menjawab YA dan 25% responden menjawab TIDAK. Indikator pertanyaan J.2 Mengenai apakah transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah 75% responden menjawab YA dan 25% responden menjawab TIDAK. Pada indikator pertanyaan J.3 mengenai apakah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kolaka telah disusun dan disajikan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP no. 71 tahun 2010 25% responden menjawab YA dan 75% responden menjawab TIDAK. Pada indikator pertanyaan J.4 mengenai apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan PP.no 71 tahun 2010 dan pelaksanaan sistem akuntansi dalam pemerintah daerah kabupaten kolaka, 75% responden menjawab YA dan 25% responden menjawab TIDAK. Dengan demikian diperoleh bobot skor sebesar 62,50%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan pada laporan keuangan Kantor Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Hasil Dari Jawaban Berdasarkan Kuesioner Yang Dibagikan Kepada Responden

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Daerah Kabupaten Kolaka diperoleh hasil bahwa penyelesaian laporan keuangan sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dilihat dari hasil kuisisioner yang rata-rata jawaban responden menunjukkan hubungan sangat tinggi hingga mendekati sempurna dari hasil olah data. Dari 10 jenis pertanyaan ada 6 jenis pertanyaan yang memperoleh hasil asosiasi tinggi mendekati sempurna dan 3 jenis pertanyaan yang memperoleh hasil asosiasi tinggi.

Jumlah persentase dari semua pertanyaan dalam kuesioner adalah 79,61%, dengan rincian pertanyaan. Tujuan pelaporan keuangan 100%, komponen laporan keuangan 97,32%, dasar hukum pelaporan keuangan 96,87%, asumsi dasar 56,25%, karakteristik kualitatif laporan keuangan 77,49%, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan 91,66%, kendala informasi yang relevan dan andal 53,14%, unsur laporan keuangan 81,69%, pengakuan unsur laporan keuangan 79,16%, pengukuran unsur laporan keuangan 62,61%.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang bertujuan khusus. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mendorong penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan bertujuan khusus apabila diperlukan. Audit Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dengan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai, namun masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana hasil jawaban responden pada kuesioner dengan hasil asosiasi cukup tinggi dan mendekati sempurna, dan sesuai hasil wawancara akan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 awal tahun 2015 mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa “ Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah pada Kantor Daerah Kabupaten Kolaka telah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Referensi :

- Abdul Halim. (2001). *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan* (2nd ed.). UUP.AMP YKNP.
- Andi Asri. (2007). *Evaluasi penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada kantor daerah Kabupaten Tolitoli*.
- Anonim. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. In *Ikatan Akuntan Indonesia*. Salemba Empat.
- Himmah Bandariy. (2011). *pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah studi pada kantor Eks karasidenan Banyumas*.
- Horngen, Harrison, Robinson, dan S. (1998). *Akuntansi di Indonesia* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Pablik*. Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (6th ed.). Salemba Empat.
- Mulyadi dan Kannaka Puradiredja. (1998). *Auditing* (5th ed.). Salemba Empat.
- peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2013). Penataan ruang.
- Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan Daerah. (2003). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Repunlik Indonesia*.
- Rahman, A. (2009). *aksesibilitas, penyajian dan penggunaan informasi keuangan daerah studi pada kota dan kabupaten Tegal*.
- Ratna Amalia Safitri. (2009). *aksesibilitas penggajian dan penggunaan informasi keuangan daerah studi empiris di kabupaten semarang*.
- Soemarsono, S. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005*. Tunas Wijaya Press.
- Studies, D. I. institute or infrastructure. (2013). *peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Penataan ruang.
- Tim Redaksi Fokus Media. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokus Media.